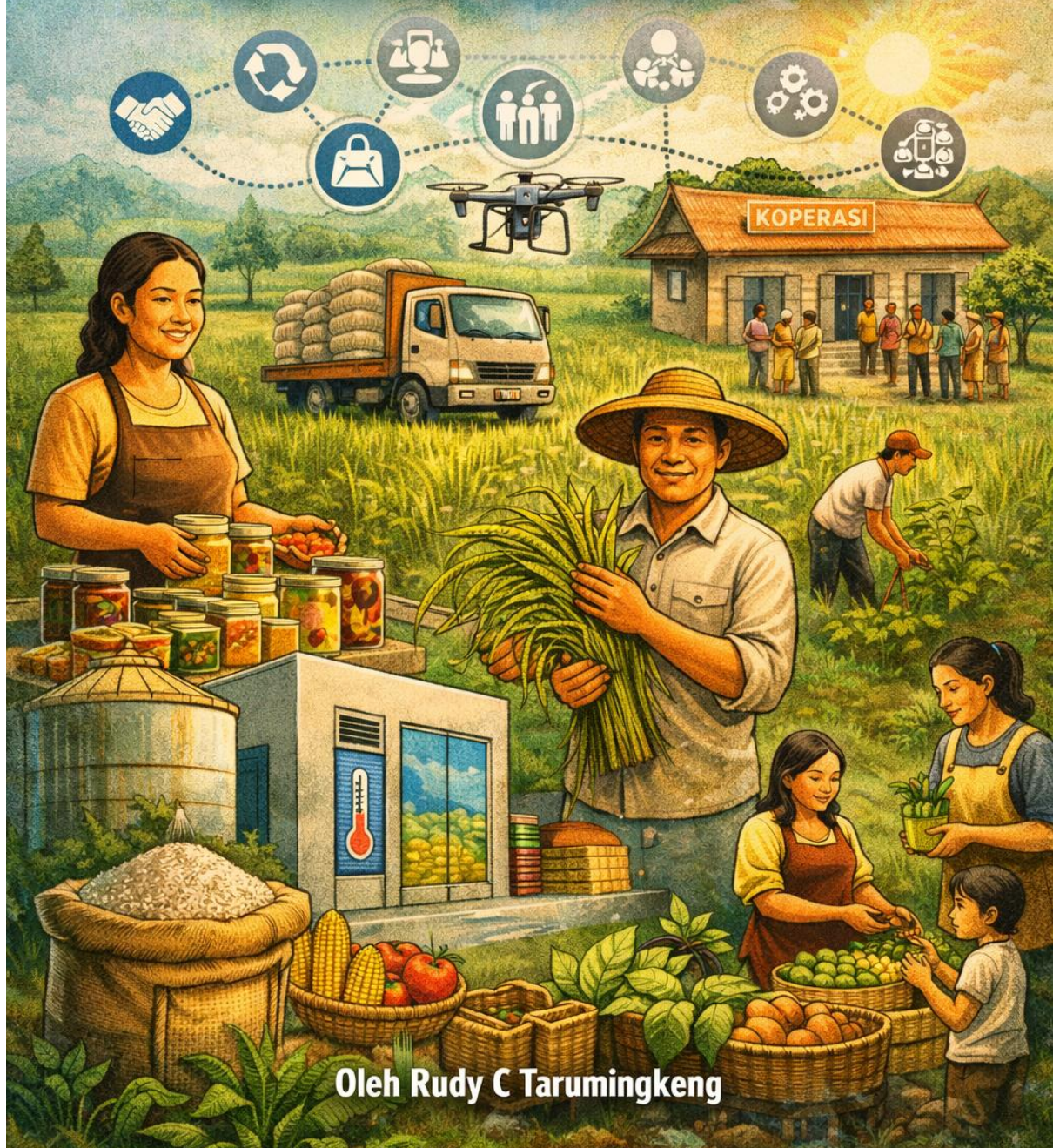


Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas

Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil
dalam Mewijudkan Kedaulatan Pangan



Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas:
Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan
Pangan*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

1 Maret 2026

KETAHANAN PANGAN BERBASIS KOMUNITAS: PERAN UMKM, KOPERASI, DAN PETANI KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

Di sebuah desa pertanian, persoalan pangan sering kali tidak lahir karena tanah berhenti menghasilkan, melainkan karena hasil panen tidak terserap dengan baik, harga jatuh pada saat raya panen, gudang tidak memadai, akses modal sempit, dan jalur distribusi terlalu panjang. Dalam konteks seperti itu, ketahanan pangan tidak cukup dipahami sebagai soal "ada atau tidak ada" beras, jagung, ikan, atau sayuran. Ketahanan pangan adalah soal apakah masyarakat memiliki kemampuan kolektif untuk memproduksi, menyimpan, mengolah, mendistribusikan, dan mengakses pangan secara adil serta berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mendefinisikan **kedaulatan pangan** sebagai hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan sekaligus memberi hak bagi masyarakat menentukan sistem pangan sesuai potensi sumber daya lokal; **kemandirian pangan** sebagai kemampuan memproduksi pangan dari dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal; dan **ketahanan pangan** sebagai kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau bagi negara sampai perseorangan. UU yang sama juga menegaskan bahwa krisis pangan dapat dipicu oleh kesulitan distribusi, perubahan iklim, bencana, dan konflik sosial.

Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan*

Dari definisi itu tampak jelas bahwa ketahanan pangan bukan sekadar proyek produksi nasional, melainkan proyek sosial, kelembagaan, dan teritorial. Negara boleh memiliki cadangan nasional, namun bila desa-desa produsen tetap lemah secara organisasi, bila petani menjual dalam posisi terpaksa, bila pelaku pengolahan skala kecil tidak tumbuh, dan bila koperasi hanya hidup di atas kertas, maka kedaulatan pangan akan tinggal slogan. Karena itu, pendekatan **berbasis komunitas** menjadi penting: ia menempatkan masyarakat lokal bukan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang mengelola pangan, pasar, cadangan, dan nilai tambah di wilayahnya sendiri. Kerangka hukum Indonesia juga memberi ruang kuat bagi pendekatan ini. UU Pangan mendefinisikan **Cadangan Pangan Masyarakat** sebagai persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga, sementara penyelenggaraan pangan sendiri dipahami sebagai kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat secara terkoordinasi dan terpadu.

Dalam lanskap global, logika ini sejalan dengan pandangan FAO bahwa **family farming** merupakan fondasi ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta kunci bagi sistem pangan yang mampu menghasilkan makanan sehat, memberi manfaat ekonomi bagi wilayah perdesaan, dan memperluas akses terhadap pangan yang memadai bagi kelompok rentan. Dengan kata lain, petani keluarga dan petani kecil bukan sekadar produsen di ujung rantai, tetapi fondasi sistem pangan itu sendiri. Bagi Indonesia, perspektif ini relevan karena struktur pertanian nasional memang masih ditopang oleh jutaan rumah tangga tani, bukan oleh korporasi besar semata. ([FAOHome](#))

Data Sensus Pertanian 2023 menegaskan besarnya basis sosial tersebut. BPS mencatat **Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)** mencapai 28,42 juta rumah tangga, sementara **Usaha Pertanian Perorangan (UTP)** mencapai 29,34 juta unit. Namun data yang sama juga memberi sinyal

peringatan: dalam sepuluh tahun terakhir jumlah **RTUP gurem** bertambah 2,64 juta rumah tangga. Artinya, basis produksi pangan kita memang luas, tetapi banyak pelakunya bekerja dalam skala sangat kecil, dengan daya tawar lemah dan rentan terhadap guncangan harga, iklim, maupun biaya input. Pada saat yang sama, BPS juga menemukan jutaan petani milenial, sebuah potensi penting bagi regenerasi dan inovasi sektor pangan bila didukung ekosistem yang tepat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, membicarakan ketahanan pangan berbasis komunitas sesungguhnya adalah membicarakan **bagaimana petani kecil tidak dibiarkan berdiri sendiri**. Dalam praktik, petani kecil menghadapi empat lingkaran kerentanan. Pertama, kerentanan produksi: lahan sempit, air tidak pasti, akses benih dan pupuk sering tidak stabil, serta tekanan perubahan iklim. Bank Dunia menegaskan bahwa produsen pertanian di Indonesia makin rentan terhadap kenaikan suhu, pola hujan yang bergeser, kekeringan, banjir, dan ledakan hama-penyakit; karena itu, program yang meningkatkan ketahanan iklim petani kecil dan pelaku rantai nilai menjadi krusial bagi pendapatan dan ketahanan pangan Indonesia. Kedua, kerentanan pembiayaan: petani sering kekurangan modal kerja dan akses kredit formal. Ketiga, kerentanan pasar: hasil panen dijual dalam kondisi mendesak. Keempat, kerentanan informasi: petani sering datang ke pasar dengan data yang lebih miskin daripada para pembeli besar. ([World Bank](#))

Di titik ini, **petani kecil** harus dipahami bukan sebagai kelompok “yang perlu dibantu sekali-sekali”, melainkan sebagai pilar utama kedaulatan pangan. Mereka menjaga produksi dasar, memelihara keberagaman komoditas lokal, mempertahankan pengetahuan budidaya setempat, dan menjadi simpul ekonomi desa. Namun pilar yang utama akan tetap rapuh bila ia tidak ditopang oleh kelembagaan yang membuat skala kecil mampu bekerja seperti skala besar tanpa kehilangan sifat sosialnya.

Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan*

Di sinilah **koperasi** menjadi penting. Secara ekonomi, koperasi adalah instrumen agregasi: ia menggabungkan volume kecil menjadi volume yang punya posisi tawar; mengubah pembelian input yang mahal menjadi pembelian kolektif yang lebih efisien; dan mengubah penjualan individual yang lemah menjadi pemasaran bersama yang lebih strategis. Secara sosial, koperasi adalah mekanisme untuk mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, rentenir, dan rantai distribusi yang terlalu panjang. Secara politik-ekonomi, koperasi adalah bentuk kelembagaan yang memungkinkan nilai tambah tertahan di desa, bukan bocor seluruhnya ke luar wilayah. ([International Labour Organization](#))

Arah kebijakan terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa negara pun sedang menghidupkan kembali gagasan koperasi sebagai instrumen pembangunan pangan dari desa. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memerintahkan percepatan pembentukan **80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, dengan fungsi yang tidak terbatas pada kantor koperasi, tetapi juga mencakup sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, **cold storage/pegudangan**, dan **logistik**. Inpres itu juga menekankan perlunya langkah strategis yang terpadu, pendanaan lintas sumber, pelatihan SDM, serta integrasi data antarkementerian dan pemerintah daerah. Pada Juli 2025, pemerintah meresmikan **80.081 koperasi desa/kelurahan**, dan dalam penjelasan resminya koperasi-koperasi ini diposisikan untuk memotong rantai pasok, memberdayakan petani dan nelayan, serta memperkuat ekonomi desa. ([Setneg](#))

Yang menarik, arah ini sebenarnya sangat dekat dengan masalah nyata ketahanan pangan berbasis komunitas. Presiden juga menekankan bahwa desa nelayan membutuhkan pendingin yang lebih besar, gudang, gerai sembako, fasilitas simpan pinjam, serta kendaraan distribusi agar hasil desa tidak busuk dan bisa segera mengalir ke pasar. Ini berarti diskursus koperasi tidak lagi boleh berhenti pada urusan rapat anggota tahunan atau badan hukum, tetapi harus bergerak ke soal **infrastruktur**

Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan*

ekonomi pangan: gudang, pendingin, kendaraan, pencatatan stok, pembiayaan mikro, dan akses pasar. Koperasi pangan yang kuat adalah koperasi yang dapat menjadi **aggregator, buyer of first resort**, penyedia logistik, sekaligus pengelola kualitas. ([Setneg](#))

Namun koperasi saja tidak cukup. **UMKM pangan** memainkan peran yang sama pentingnya, terutama pada tahapan pengolahan, pengawetan, pengemasan, distribusi lokal, serta diversifikasi pangan. BPS dalam publikasi *Profil Industri Mikro dan Kecil 2024* menegaskan bahwa industri mikro dan kecil berperan besar dalam memperkokoh perekonomian Indonesia karena menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal, walaupun masih menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan modal, kualitas SDM dan manajemen, serta lemahnya legalitas. Dalam konteks pangan, UMKM inilah yang dapat mengubah singkong menjadi tepung mocaf, ikan menjadi abon atau produk beku, cabai menjadi pasta, susu menjadi olahan, atau hasil hortikultura yang cepat rusak menjadi produk bernilai tambah lebih panjang umur simpannya. Tanpa UMKM, desa produsen akan terus menjual bahan mentah murah dan membeli kembali produk olahan mahal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Peran UMKM juga sangat strategis untuk mengatasi satu problem yang sering diabaikan, yakni **food loss**. FAO mencatat bahwa secara global **13,2 persen** pangan hilang dalam rantai pasok setelah panen hingga sebelum ritel, dan **19 persen** lagi terbuang pada tingkat ritel, layanan makanan, dan rumah tangga. FAO juga menekankan bahwa pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan berdampak langsung pada ketersediaan pangan, akses pangan, dan pendapatan petani kecil. Bagi konteks Indonesia, angka global ini memberi pelajaran yang sangat nyata: pangan tidak hanya hilang karena gagal tanam, tetapi karena tidak ada pengeringan, pengolahan, pendinginan, sortasi, kemasan, dan pasar terjadwal. Di sinilah UMKM pengolahan pangan, terutama yang

Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan*

terhubung dengan koperasi dan petani kecil, menjadi instrumen ketahanan pangan. Mengolah hasil panen lokal bukan sekadar bisnis; ia adalah strategi menyelamatkan volume, gizi, pendapatan, dan stabilitas harga. ([FAOHome](#))

Bila petani kecil adalah basis produksi, koperasi adalah kelembagaan agregasi, dan UMKM adalah mesin nilai tambah, maka **kedaulatan pangan** muncul dari sinergi ketiganya. Kedaulatan pangan berbasis komunitas berarti desa memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang ditanam, bagaimana diproduksi, ke mana dijual, bagaimana disimpan, siapa yang memperoleh nilai tambah, dan bagaimana masyarakatnya memperoleh pangan yang sehat dan terjangkau. Dalam kerangka ini, koperasi tidak boleh menjadi pesaing petani, melainkan perpanjangan tangan petani. UMKM tidak boleh memeras produsen primer, melainkan bertumbuh bersama mereka. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi regulator dari jauh, melainkan fasilitator yang membangun ekosistem: data, infrastruktur, penyuluhan, pembiayaan, dan jaminan pasar. Kerangka kebijakan Badan Pangan Nasional 2025 sendiri menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan harus berlandaskan **kedaulatan** dan **kemandirian** pangan, serta menuntut kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Pendekatan komunitas juga penting karena sistem pangan Indonesia sangat beragam secara ekologis dan budaya. UU Pangan menegaskan bahwa pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal, sementara panganekaragaman pangan adalah upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis sumber daya lokal. Secara konseptual, ini berarti ketahanan pangan berbasis komunitas tidak harus selalu diterjemahkan sebagai ketergantungan pada satu komoditas utama saja. Desa sagu, desa umbi,

desa hortikultura, desa ikan, atau desa jagung seharusnya dapat membangun model kedaulatannya masing-masing, sepanjang ada kelembagaan yang menghubungkan produksi, pengolahan, cadangan, dan pasar. Dengan demikian, komunitas tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga perancang sistem pangan lokalnya.

Karena itu, **cadangan pangan masyarakat** atau lumbung pangan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai warisan masa lalu yang romantik, melainkan sebagai instrumen modern ketahanan berbasis komunitas. Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa penguatan **Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)** melalui **Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)** dimaksudkan untuk meminimalisir kondisi kelebihan pasokan maupun kekurangan pasokan antarmusim; masyarakat dapat menyimpan hasil panennya ketika berlebih, lalu mengeluarkan stok pada masa paceklik. Dokumen perencanaan Bapanas juga menegaskan bahwa Pasal 33 ayat (2) UU Pangan mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai kearifan lokal. Dalam bahasa manajemen modern, lumbung pangan itu sesungguhnya adalah sistem **buffer stock** sosial yang dikelola dengan prinsip lokal. Ia menjadi jembatan antara musim, antara panen dan paceklik, antara produksi dan konsumsi.

(badanpangan.go.id)

Di sinilah letak keunggulan pendekatan komunitas dibanding pendekatan yang terlalu tersentralisasi. Sistem yang terlampau bergantung pada intervensi dari atas cenderung kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam respons mikro. Sebaliknya, sistem komunitas dapat bergerak cepat karena ia berada dekat dengan persoalan. Ia tahu kapan panen datang, kapan harga merosot, siapa warga yang rawan pangan, siapa yang bisa menyimpan stok, siapa yang punya mesin penggiling, dan siapa yang bisa mengolah hasil samping. Dengan kata lain, komunitas memiliki **pengetahuan terletak** (*situated knowledge*) yang

tidak selalu tertangkap oleh statistik nasional. Tetapi agar pengetahuan lokal ini efektif, ia harus dipadukan dengan tata kelola modern: pencatatan stok, standar mutu, akses pembiayaan, kontrak usaha, dan teknologi penyimpanan. (badanpangan.go.id)

Masalahnya, banyak komunitas pangan di Indonesia belum memiliki kemampuan kelembagaan yang cukup untuk memainkan peran ini secara berkelanjutan. Koperasi kerap lemah dalam tata kelola, UMKM lemah dalam legalitas dan standardisasi, sedangkan petani kecil lemah dalam modal dan organisasi. Karena itu, kebijakan yang baik tidak cukup hanya membentuk lembaga baru; ia harus **memperkuat kapasitas lembaga yang ada**. Inpres 9/2025 sudah menyebut pendampingan, edukasi, pelatihan SDM, inventarisasi koperasi yang ada, dan penyusunan model bisnis sebagai tugas pemerintah. Ini penting, sebab koperasi yang diberi gudang tanpa manajemen stok akan gagal; UMKM yang diberi mesin tanpa akses pasar akan mandek; petani yang diberi kredit tanpa pendampingan usaha bisa terjebak pada utang baru. Pembangunan kelembagaan pangan harus diperlakukan sebagai pembangunan kompetensi, bukan semata pembangunan fisik. ([Setneg](#))

Dalam aspek pembiayaan, salah satu instrumen yang relevan adalah **KUR sektor pertanian**. Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa KUR merupakan program prioritas nasional untuk mendukung pembiayaan UMKM, termasuk sektor pertanian, dan dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat usaha tani dan agribisnis yang berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ini berarti ketahanan pangan berbasis komunitas memerlukan desain pembiayaan yang melihat petani kecil, koperasi, dan UMKM sebagai satu ekosistem, bukan sebagai penerima kredit yang terpisah. Kredit untuk petani tanpa offtaker koperasi berisiko macet; koperasi tanpa UMKM pengolahan sulit menyerap surplus; UMKM tanpa pasokan bahan baku teratur juga

Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan*

limbung. Karena itu, pembiayaan pangan seharusnya bersifat **rantai nilai** dan **kelembagaan**, bukan hanya individual.

(pustaka.bppsdp.pertanian.go.id)

Kita juga perlu memahami bahwa kesejahteraan produsen pangan tidak boleh dikesampingkan dalam pembicaraan ketahanan pangan. Data BPS menunjukkan **Nilai Tukar Petani (NTP)** nasional Desember 2025 berada di angka 125,35 dan **NTUP** 130,77, sementara pada bulan yang sama harga beras di penggilingan juga meningkat. Angka-angka ini memberi gambaran bahwa posisi ekonomi petani bergerak, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kesejahteraan produsen sangat dipengaruhi oleh perubahan harga input, harga output, dan kondisi pasar. Pada tingkat komunitas, stabilitas pangan bukan berarti menekan harga serendah mungkin, melainkan menemukan keseimbangan agar konsumen memperoleh pangan terjangkau dan produsen tetap hidup layak.

Koperasi dan UMKM dapat berperan sebagai penyangga keseimbangan itu dengan memotong biaya distribusi, mengurangi kehilangan pascapanen, dan menambah nilai hasil panen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](http://BadanPusatStatistikIndonesia))

Bila ditarik lebih jauh, ketahanan pangan berbasis komunitas sesungguhnya adalah jalan tengah antara dua ekstrem. Ia bukan romantisme lokal yang anti-pasar, dan bukan pula liberalisasi pangan yang menyerahkan semuanya pada mekanisme harga. Pendekatan ini menerima kenyataan bahwa pasar dibutuhkan, tetapi menolak pasar yang dikuasai segelintir pihak. Ia menerima pentingnya efisiensi, tetapi menolak efisiensi yang menyingkirkan petani kecil. Ia menerima teknologi, tetapi bukan teknologi yang memutus manusia dari tanah dan komunitasnya. Pendekatan ini juga selaras dengan semangat FAO dan IFAD bahwa dukungan terhadap petani keluarga memerlukan kerangka hukum, kebijakan, investasi, dan kelembagaan yang memungkinkan mereka menjadi aktor utama transformasi sistem pangan. (FAOHome)

Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan*

Untuk melihatnya secara lebih konkret, bayangkan sebuah kecamatan penghasil padi, sayuran, dan ikan air tawar. Dalam sistem lama, petani padi menjual gabah sendiri-sendiri; petani sayur menjual cepat karena takut busuk; pembudidaya ikan menjual ke pengepul saat panen besar; ibu-ibu desa mengolah sebagian kecil hasil menjadi keripik atau sambal botol tanpa standar mutu; dan ketika terjadi paceklik harga, desa kembali membeli pangan dari luar dengan harga tinggi. Dalam sistem komunitas yang diperkuat, petani masuk koperasi produksi dan pemasaran; koperasi mengelola gudang, pengering, unit pendingin sederhana, kendaraan angkut, dan kontrak pasokan; UMKM lokal mengolah hasil menjadi produk bernilai tambah; lumbung pangan menyimpan sebagian stok; dan data permintaan lokal dicatat secara berkala. Ketika panen raya, tidak semua hasil dibuang ke pasar sekaligus. Ketika paceklik, stok komunitas dan produk olahan membantu menstabilkan konsumsi. Ketika harga turun, koperasi dapat menahan sebagian barang dan mengatur distribusi. Itulah bentuk paling konkret dari kedaulatan pangan: bukan menutup diri dari dunia luar, tetapi memiliki kapasitas internal untuk tidak selalu tunduk pada tekanan luar. Dukungan resmi atas model seperti ini juga tampak pada kebijakan terbaru yang menempatkan gudang, cold storage, logistik, dan simpan pinjam sebagai unit usaha koperasi desa. ([Setneg](#))

Meski demikian, ada beberapa tantangan serius yang tidak boleh diremehkan. Pertama, **fragmentasi lahan dan skala usaha** membuat banyak petani sulit naik kelas tanpa agregasi kelembagaan. Kedua, **governance trap**: koperasi bisa berubah menjadi lembaga formal tanpa jiwa usaha bila tata kelolanya lemah. Ketiga, **standardisasi dan keamanan pangan**: UMKM pangan perlu dukungan legal, sanitasi, kemasan, dan sertifikasi agar dapat menembus pasar yang lebih luas. Keempat, **digital divide**: transformasi data dan pemasaran digital bisa memperlebar jurang bila tidak disertai pendampingan. Kelima,

Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan*

perubahan iklim: tanpa adaptasi produksi, kelembagaan hilir saja tidak cukup. Bank Dunia sudah mengingatkan bahwa ketahanan produsen kecil dan pelaku rantai nilai terhadap tekanan iklim adalah syarat langsung bagi keamanan pangan Indonesia. ([World Bank](#))

Karena itu, strategi membangun ketahanan pangan berbasis komunitas perlu mencakup setidaknya enam agenda. Pertama, **penguatan petani kecil** melalui penyuluhan, input yang tepat, air, benih, akses pembiayaan, dan organisasi ekonomi. Kedua, **modernisasi koperasi pangan** sebagai agregator produksi, penyedia jasa logistik, pengelola gudang, dan lembaga niaga yang transparan. Ketiga, **penguatan UMKM pangan** dalam pengolahan, packaging, legalitas, keamanan pangan, dan pemasaran. Keempat, **pengembangan cadangan pangan masyarakat** yang betul-betul hidup, bukan hanya bangunan lumbung tanpa mekanisme putar stok. Kelima, **integrasi data pangan desa-daerah-nasional**, sebagaimana juga ditekankan dalam Inpres 9/2025. Keenam, **diversifikasi pangan lokal**, agar komunitas tidak terlalu bergantung pada satu komoditas atau satu jalur pasok saja. ([Setneg](#))

Di atas semua itu, yang paling penting adalah perubahan cara pandang. Kedaulatan pangan sering disalahartikan sebagai urusan negara melawan impor. Padahal pada level yang lebih mendasar, kedaulatan pangan adalah **kapasitas masyarakat untuk tidak menjadi penonton di dalam sistem pangannya sendiri**. Ia berarti petani kecil tidak hanya menanam, tetapi ikut menentukan harga dan jalur pasar. Ia berarti koperasi tidak hanya menjadi stempel, tetapi mesin pengorganisasian ekonomi lokal. Ia berarti UMKM tidak hanya berdagang, tetapi menjadi pengolah nilai tambah dan penjaga sirkulasi ekonomi komunitas. Ia berarti lumbung pangan bukan nostalgia, tetapi instrumen manajemen risiko. Dan ia berarti negara hadir bukan untuk menggantikan komunitas, melainkan untuk memperkuat komunitas dengan hukum, pembiayaan, data, infrastruktur, dan perlindungan pasar yang adil. Semangat ini

Rudy C Tarumingkeng : *Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan*

sejalan dengan definisi kedaulatan pangan dalam UU Pangan yang memberi hak kepada masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai potensi sumber daya lokal.

Dengan demikian, **ketahanan pangan berbasis komunitas** bukanlah alternatif pinggiran, melainkan inti dari strategi jangka panjang Indonesia. Ia menautkan produksi dengan pengolahan, pasar dengan gotong royong, efisiensi dengan keadilan, dan kebijakan nasional dengan realitas desa. Data resmi menunjukkan bahwa struktur pertanian Indonesia tetap bertumpu pada jutaan rumah tangga tani, sementara arah kebijakan terbaru juga mulai menghidupkan kembali koperasi desa, logistik lokal, dan cadangan pangan masyarakat. Tantangan tentu tidak kecil: kemiskinan struktural petani, lemahnya kelembagaan, tekanan iklim, dan dominasi rantai pasok yang tidak adil masih nyata. Tetapi justru karena itulah, jawaban yang paling realistis bukanlah menunggu keajaiban dari atas, melainkan membangun kekuatan dari bawah—dari petani kecil yang terorganisasi, koperasi yang profesional, UMKM yang tumbuh sehat, dan komunitas yang percaya bahwa pangan bukan sekadar komoditas, melainkan dasar martabat bersama. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Berikut **glosarium** dan **daftar referensi** untuk melengkapi naskah **“Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas: Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan.”**

Glosarium ini disarikan dari kerangka hukum pangan Indonesia, dokumen Badan Pangan Nasional, data BPS, serta rujukan FAO, ILO, dan

World Bank yang relevan dengan petani kecil, koperasi, UMKM pangan, dan sistem pangan berbasis komunitas. ([JDIHN](#))

Glosarium

Ketahanan pangan — kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, baik dari sisi jumlah, mutu, keamanan, keberagaman, gizi, pemerataan, maupun keterjangkauan.

Kedaulatan pangan — hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri, serta hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumber daya lokal.

Kemandirian pangan — kemampuan bangsa memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

Keamanan pangan — kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Pangan lokal — pangan yang dikonsumsi masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan wilayahnya.

Penganekaragaman pangan — upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis sumber daya lokal.

Cadangan pangan masyarakat — persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat, baik pada tingkat rumah tangga, komunitas, maupun pelaku usaha pangan.

Lumbung pangan masyarakat — kelembagaan penyimpanan pangan pada tingkat komunitas yang berfungsi sebagai penyangga saat surplus dan paceklik.

Sistem pangan — keseluruhan proses yang terkait dengan penyediaan pangan: produksi, pascapanen, pengolahan, distribusi, perdagangan, konsumsi, hingga pengelolaan limbah pangan.

Sistem pangan berbasis komunitas — model pengelolaan pangan yang bertumpu pada partisipasi warga, kelembagaan lokal, dan penguatan ekonomi wilayah. ([JDIHN](#))

Petani kecil — produsen pertanian dengan skala lahan, modal, dan kapasitas usaha terbatas, tetapi memegang peran penting dalam produksi pangan.

Petani gurem — rumah tangga usaha pertanian dengan penguasaan lahan sangat sempit; di Indonesia, kelompok ini masih besar dan menjadi indikator kerentanan struktural pedesaan.

Petani milenial — petani dari kelompok usia muda yang berpotensi menjadi penggerak modernisasi pertanian, digitalisasi, dan inovasi kelembagaan.

UMKM pangan — usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam produksi, pengolahan, distribusi, atau perdagangan pangan.

Koperasi produsen — koperasi yang anggotanya para produsen dan bertujuan memperkuat posisi tawar, efisiensi input, pembiayaan, serta pemasaran bersama.

Agregasi — proses menghimpun volume kecil dari banyak produsen menjadi volume ekonomi yang lebih efisien dan lebih kuat secara pasar.

Rantai pasok pangan — aliran barang, informasi, dan nilai dari produsen hingga konsumen.

Rantai nilai pangan — rangkaian kegiatan yang menambah nilai ekonomi pada pangan, mulai dari produksi sampai pemasaran akhir.

Offtaker — pihak pembeli atau penyerap hasil produksi secara terencana, biasanya melalui kontrak atau kemitraan.

Posisi tawar — kemampuan produsen atau pelaku usaha untuk memengaruhi harga, syarat transaksi, dan hubungan niaga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Nilai tambah — peningkatan nilai ekonomi suatu produk akibat pengolahan, pengemasan, penyimpanan, atau peningkatan mutu.

Pascapanen — tahap setelah panen yang meliputi pengeringan, sortasi, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan awal.

Food loss (kehilangan pangan) — hilangnya kuantitas atau mutu pangan pada tahap produksi, panen, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi sebelum ritel.

Food waste (pemborosan pangan) — pangan yang layak konsumsi tetapi terbuang pada tahap ritel, jasa boga, atau rumah tangga.

Cold storage / rantai dingin — sistem pendinginan untuk menjaga mutu komoditas mudah rusak seperti ikan, daging, susu, buah, dan sayuran.

Traceability (ketertelusuran) — kemampuan menelusuri asal-usul, proses, dan jalur distribusi produk pangan.

Buffer stock — stok cadangan yang disiapkan untuk menstabilkan pasokan dan harga ketika terjadi gangguan pasar atau produksi.

Stabilisasi pasokan dan harga pangan — serangkaian kebijakan untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan harga tetap terjangkau tanpa merusak insentif produsen.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian — skema pembiayaan prioritas bagi usaha pertanian dan agribisnis agar lebih mudah memperoleh modal kerja dan investasi.

Ketahanan iklim (climate resilience) — kemampuan sistem pertanian dan pangan bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari tekanan iklim.

Climate-smart agriculture — pendekatan pertanian yang menggabungkan peningkatan produktivitas, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan, bila mungkin, penurunan emisi.

Kewirausahaan desa — praktik usaha yang tumbuh dari potensi lokal dan diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat setempat.

Ekonomi kerakyatan — sistem ekonomi yang menempatkan rakyat banyak sebagai pelaku utama, dengan orientasi pemerataan, partisipasi, dan keadilan.

Inklusi ekonomi — keterlibatan kelompok kecil, rentan, dan tertinggal ke dalam proses produksi, pembiayaan, pasar, dan manfaat pembangunan.

Kedaulatan komunitas atas pangan — kemampuan komunitas untuk menentukan apa yang diproduksi, bagaimana disimpan, diolah, dipasarkan, dan dikonsumsi secara bermartabat. ([FAOHome](#))

Daftar referensi

A. Regulasi dan kebijakan Indonesia

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.* ([JDIHN](#))

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.* ([Peraturan BPK](#))

Rudy C Tarumingkeng : Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas:
Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan
Pangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Inilah Inpres 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 14 April 2025. ([Setneg](#))

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 21 Juli 2025. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Badan Pangan Nasional. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025. ([badanpangan.go.id](#))

Badan Pangan Nasional. Rencana Aksi Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025. ([badanpangan.go.id](#))

Badan Pangan Nasional. NFA Laksanakan Uji Petik Penilaian terhadap Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Calon Penerima DAK TA 2025. 14 Agustus 2024. ([badanpangan.go.id](#))

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Kementerian Pertanian. KUR Sektor Pertanian: Solusi Modal bagi Petani Milenial. 10 Juli 2025. ([pustaka.bppsdp.pertanian.go.id](#))

B. Data dan statistik Indonesia

Badan Pusat Statistik. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 – Tahap I (Berita Resmi Statistik). 4 Desember 2023. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 – Tahap I (Publikasi). 15 Desember 2023. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. Profil Industri Mikro dan Kecil 2024. 16 September 2025. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen. 5 Januari 2026. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

C. Rujukan internasional dan laporan kelembagaan

Food and Agriculture Organization (FAO). *Food Loss and Waste Database.* ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization (FAO). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024.* ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization (FAO). *World Food Forum 2024: Global Family Farming Forum.* 15 Oktober 2024. ([FAOHome](#))

World Bank. *Climate-Smart Agriculture in Indonesia.* ([World Bank](#))

World Bank. *Indonesia Agriculture Value Chain Development Project (ICARE).* 2022. ([World Bank](#))

International Labour Organization / COPAC. *Transforming Our World: A Cooperative 2030 – Cooperative Contributions to SDG 2.* 2018. ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. *Cooperatives Promoting Inclusive Rural-Urban Linkages.* 14 November 2016. ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. *Cooperatives for People-Centred Rural Development.* ([International Labour Organization](#))

D. Artikel akademik pendukung

Wheeler, T., & von Braun, J. (2013). *Climate change impacts on global food security.* *Science.* ([Science](#))

Lobell, D. B., Schlenker, W., & Costa-Roberts, J. (2011). *Climate Trends and Global Crop Production Since 1980.* *Science.* ([Science](#))

Rudy C Tarumingkeng : Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas:
Peran UMKM, Koperasi, dan Petani Kecil dalam Mewujudkan Kedaulatan
Pangan

Vermeulen, S. J., Campbell, B. M., & Ingram, J. S. I. (2012). *Climate Change and Food Systems. Annual Review of Environment and Resources*, 37, 195–222. ([Annual Reviews](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 1 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a16ce0-f480-8399-8ca3-e027be9be2d5>